

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data, wawancara, perhitungan *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR), dan perhitungan Rasio Efisiensi Anggaran. diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memanfaatkan pinjaman daerah sebagai instrumen pembiayaan pembangunan, khususnya melalui skema Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang bersumber dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Total pinjaman yang direalisasikan mencapai Rp980,87 miliar dan dialokasikan untuk pembiayaan infrastruktur strategis daerah. Pinjaman ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menutup keterbatasan kapasitas fiskal dan mempercepat pembangunan pascapandemi
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan pengembalian pinjaman Pemerintah Provinsi NTT berada dalam kategori sangat aman. Hal ini ditunjukkan oleh nilai Debt Service Coverage Ratio (DSCR) yang secara konsisten jauh di atas batas minimal 2,5, yakni berkisar antara 16,80 sampai 52,75 selama periode penelitian. Kondisi ini menandakan bahwa pendapatan daerah lebih dari cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang.
3. Dana transfer dari pemerintah pusat (DAU, DAK, dan DBH) memiliki peran penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah, terutama sebagai

sumber pendanaan utama dalam struktur pendapatan APBD. Dana transfer membantu menjaga stabilitas keuangan daerah sehingga kewajiban pembayaran pinjaman dapat dipenuhi tanpa mengganggu belanja wajib dan belanja pembangunan. Namun, ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer juga menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah masih perlu terus ditingkatkan.

4. Tingkat efisiensi pengelolaan anggaran Pemerintah Provinsi NTT menunjukkan tren yang semakin membaik, dari 80,06% pada tahun 2021 menjadi 91,76% pada tahun 2024. Peningkatan efisiensi ini berkontribusi positif terhadap kemampuan pengembalian pinjaman, karena penggunaan anggaran yang lebih efektif memperbesar ruang fiskal untuk memenuhi kewajiban utang. Dengan efisiensi yang tinggi, DSCR dapat dipertahankan pada tingkat yang sangat aman.

## **5.2.Saran**

1. Bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pemerintah provinsi dapat meningkatkan PAD melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Intensifikasi dilakukan melalui digitalisasi layanan Samsat, peningkatan kepatuhan PKB dan BBNKB, pemutakhiran database kendaraan, serta pengawasan pajak BBM. Sementara ekstensifikasi dilakukan dengan memperluas basis pajak melalui pendataan kendaraan operasional perusahaan, registrasi alat berat, optimalisasi pajak air permukaan, serta kewajiban mutasi kendaraan luar

daerah. Strategi ini penting untuk memperkuat kemandirian fiskal dan menjaga keberlanjutan pembiayaan pembangunan daerah.

Dalam pengambilan pinjaman daerah di masa mendatang, pemerintah daerah perlu tetap mempertahankan prinsip kehati-hatian dengan menjadikan DSCR sebagai indikator utama kelayakan fiskal sehingga beban utang tidak mengganggu stabilitas APBD. Pemerintah juga perlu melakukan penataan struktur belanja daerah, terutama dengan mengendalikan proporsi belanja pegawai dan mengarahkan anggaran ke belanja yang lebih produktif khususnya belanja modal yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PAD.

## 2. Bagi DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur

DPRD diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan terhadap kebijakan pinjaman daerah dan pengelolaan APBD, serta memastikan bahwa setiap kebijakan pembiayaan daerah didasarkan pada analisis kemamouan fiskal dan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat.

## 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan kuantitatif atau *mixed methods* agar diperoleh pengukuran yang lebih komprehensif, menambahkan variabel lain seperti pertumbuhan ekonomi daerah, inflasi dan tingkat pengangguran, serta memperluas objek penelitian tidak hanya pada tingkat provinsi, tetapi juga kabupaten/kota untuk memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai kemampuan pengembalian pinjaman daerah.